

GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Muh. Syainal Nur¹, Achmad Husen¹

¹Manajemen Lingkungan, Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

*Corresponding author.

E-mail Address: msyainalnur@gmail.com

Abstract

Konsep good environmental dan pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang berupaya untuk memfasilitasi lingkungan sehat dan keseimbangan ekosistem sehingga dapat berguna bagi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak bisa terjadi begitu saja tanpa ada upaya-upaya mewujudkannya, upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan keseimbangan lingkungan merupakan hal penting dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan sebuah studi literatur dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha menjelaskan penerapan good environmental governance dan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Pada studi literatur ini penulis menggunakan berbagai sumber tertulis seperti artikel dan jurnal yang relevan dengan kajian dan penelitian ini. Studi ini fokus membahas upaya pemberdayaan masyarakat dilihat dari konsep good environmental governance dan pembangunan berkelanjutan. Hasil studi ini secara umum menunjukkan bahwa penerapan konsep good environmental dan pembangunan berkelanjutan memberikan pengaruh dan dampak yang baik pada upaya pemberdayaan masyarakat. Namun karena keterbatasan metode penelitian yang masih studi literatur, hasil penelitian ini tidak mampu menjawab hubungan antar variable secara khusus apalagi jika salah satu variable dikaitkan dengan fenomena tertentu. Olehkarena itu diperlukan penelitian dengan metode penelitian yang lebih akurat dan kredibel sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Keywords: *good environmental, pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.*

Abstract

The concept of good environmental and sustainable development is a concept that seeks to facilitate a healthy environment and ecosystem balance so that it can be useful for community empowerment. Community empowerment cannot just happen without efforts to make it happen, efforts to create a healthy environment and environmental balance are important in realizing the goals of community empowerment. This research is a literature study with descriptive qualitative research that seeks to explain the application of good environmental governance and sustainable development as an effort to empower the community. In this literature study, the author uses various written sources such as articles and journals that are relevant to this study and research. This study focuses on discussing community empowerment efforts in terms of the concept of good environmental governance and sustainable development. The results of this study generally indicate that the application of the concept of good environmental and sustainable development has a good influence and impact on community empowerment efforts. However, due to the limitations of the research method which is still a literature study, the results of this study are not able to answer the relationship between variables specifically, especially if one of the variables is associated with a particular phenomenon. Therefore, research with more accurate and credible research methods is needed so as to produce better research.

Keywords: *good environmental governance, sustainable development and community empowerment.*

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah proses pemanfaatan teknologi untuk mengolah sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya manusia. Ini membutuhkan perencanaan yang sangat matang dan kompleks, dengan mempertimbangkan semua perspektif dan persepsi yang saling mempengaruhi selama pengembangan. Pembuat kebijakan harus berhati-hati dalam mengimplementasikan hasil kebijakan, karena penelitian dan evaluasi mendalam dari semua dimensi yang saling terkait diperlukan sebelum memulai kebijakan untuk pembangunan.

Praktik pembangunan sebenarnya ditujukan sebagai usaha menaikkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas pembangunan selalunya tentang penggunaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan. Dengan semakin meningkatnya realisasi pembangunan, ruang ekologis semakin tergerus dan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Artinya pembangunan pada akhirnya berdampak pada lingkungan berupa perusakan atau pencemaran lingkungan. Jadi masuk akal jika pembangunan pada hakikatnya juga adalah “gangguan” terhadap keseimbangan lingkungan (Nopyandri, 2014).

Untuk menerapkan tata kelola yang baik maka harus berbasis prinsip “*good governance*” Ini adalah sebuah syarat

yang harus dipenuhi guna mencapai equilibrium antara pembangunan dan lingkungan. Pemerintahan diartikan sebagai “pelaksana kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk memerintah suatu negara, termasuk metode yang canggih dan prosedur terkait, istitusi yang mampu mengekspresikan kebutuhan dan keinginan dalam memperoleh hak dan memenuhi tanggung jawab baik individu maupun kelompok sosial”. menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara mereka; Tata kelola dalam kondisi yang baik ketika adanya hubungan dan kerja sama pemerintah dengan sektor swasta bersama rakyat dalam tata kelola SDA, lingkungan, social dan ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi kini banyak dikenal dan dikembangkan dalam berbagai sumber sastra di Eropa. Pemberdayaan masyarakat sebagai rencana pembangunan mencakup kualits sosial dan budaya yang berkembang dengan cepat dalam masyarakat dan mencerminkan paradigma pembangunan dimana orang atau masyarakat menarik perhatian sebagai subjek dan subjek pembangunan. Secara ideal, pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tidak dapat lepas dari jebakan keterbelakangan dan kemiskinan pada kondisinya saat ini.

Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya adalah sebuah proses untuk memberdayakan masyarakat, menjadikan masyarakat mandiri secara social dan ekonomi, salah satu factor penting yang sudah dan banyak dilakukan adalah pembangunan infrastruktur. Dalam penelitiannya Sururi, (2017) menemukan bahwa pembangunan insfrastruktur akan berdampak pada pemberayaan masyarakat jika setidaknya menerapkan 12 prinsip pemberdayaan masyarakat di antaranya adalah analisis minat & kebutuhan, analisis prinsip pengorganisasian masyarakat, analisis keragaman budaya local, analisi perubahan budaya, analisis belajar sambil bekerja, analisis penggunaan metode yang sesuai, analisis kepemimpinan, analisis spesialis yang terlatih, analisis segenap keluarga dan analisis kepuasan.

Baskoro, (2016) dalam sebuah penelitiannya pengelolaan ekowisata dan implikasinya terhadap ketahanan masyarakat di desa Sukarara menyebut bahwa Dapat dikatakan bahwa pengelolaan ekowisata di Desa Sukarara telah berhasil memberikan dampak positif bagi pelestarian masyarakat desa dan kehidupan sosialnya, ekonomi, lingkungan dan budaya lokal penduduknya. Pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat terbukti mampu memberi lapangan pekerjaan kepada

masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

Konsep *good environmental governancemengatur dan mengontrol* pembangunan dan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara bersama-sama, maksudnya pembangunan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* artinya pembangunan dilakukan dengan tujuan keberlangsungan kehidupan manusia di masa depan, pembangunan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan akan memperhitungkan dampak-dampak yang akan terjadi jika suatu proyek pembangunan dilakukan, tujuan utamanya adalah menjamin keberlanjutan peradaban di masa depan dengan segala keterbatasan sumber daya.

Namun, meski kedua konsep tersebut sangat baik dan bermanfaat tidak bisa kita bantah bahwa faktanya banyak pembangunan yang justru menjadi malapetaka bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya sehingga terjadi gap dengan tujuan awalnya yaitu keberlanjutan hidup masyarakat.

Khasanah et al., (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pembangunan jalan tol solo-kertosono berdampak positif dan negative, dampak negatifnya diakibatkan pembangunan ini tidak berwawasan lingkungan sehingga hal

ini mengakibatkan hilangnya sekitar 12 hektar lahan subur, hilangnya air irigasi ke persawahan, tidak ada akses jalan menuju persawahan seberang, dan meningkatnya polusi udara dari banyaknya kendaraan besar yang mengangkut material. Pembangunan tersebut juga belum mampu mengurangi jumlah penganguran.

Hal serupa disampaikan oleh Miswanto & Safaat, (2018) dalam penelitiannya tentang insdutri pariwisata di desa Teluk Bakau, Kepulauan Riau. Ia menerangkan bahwa industri pariwisata yang diharapkan menambah pendapatan masyarakat justru sebaliknya kehidupan sosio-ekonomi masyarakat Teluk Bakau tidak mengalami perubahan sementara insvestor memperoleh profit yang besar dari kegiatan pariwisata padahal lahan yang dikelola industri pariwisata adalah pantai desa teluk Bakau.

Oleh karena itu, peneliti merasa sangat penting untuk merealisasikan penelitian ini yang bertujuan untuk menguraikan hubungan-hubungan penerapan prinsip *good environmental governance* dan pembangunan berkelanjutan dalam pemberdayaan masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan teknik analisis

deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang ada yang sedang terjadi sekarang atau di masa lalu. Penelitian studi literatur adalah penelitian yang mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, dan cerita sejarah., dll. (Timotius, 2017). Adapun artikel ini fokus pada *good environmental governance*, pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Good environmental governance

Konsep pengelolaan lingkungan dalam pemerintahan disebut *good environmental governance* yaitu konsep yang melihat negara dan masyarakat sebagai pelaku sekaligus pelaku utama konservasi lingkungan. Negara adalah institusi yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber daya dan kapabilitas serta mengubah kondisi lingkungan dalam skala besar. Akibatnya, keberlangsungan lingkungan hidup sangat ditentukan oleh kapabilitas suatu negara untuk mengatur perilakunya berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan.

Berkat konsep tata *good environmental governance*, dapat dipahami sebagai dasar pemikiran publik dalam konteks pengelolaan lingkungan melalui interaksi dengan masyarakat. Akan tetapi, perlu diingat bahwa peran negara di sini

bukanlah untuk mengubah kemampuan negara untuk mengubah kondisi biofisik, tetapi untuk memastikan bahwa tingkat dan arah serta sejauh mana ekosistem dapat bertahan dapat dicocokkan.

Konsep *good environmental governance* harus dibangun di atas premis sentral bahwa sistem sosial dan ekosistem terkadang terlibat dalam interaksi tanpa akhir (aksi dan reaksi). Hubungan antar masyarakat yang terbentuk dalam kerangka pemikiran pemerintahan telah membawa interaksi antara masyarakat, negara, dan sektor swasta pada tingkat yang sama. Tata kelola pemerintah dalam konsep *good environmental governance* digunakan untuk mengetahui dan menata hubungan interaksi antara sistem sosial dan ekosistem.

Pemerintah yang telah mampu menerapkan tata kelola yang baik belum tentu peduli dengan kelestarian ekosistem. Oleh karena itu, pemerintah yang ingin menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik masih memerlukan persyaratan tambahan, yang dapat dikatakan pengelolaan lingkungan yang baik dengan mengaitkan semua kebijakan pembangunan dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan (Purniawati et al., 2020).

Dengan demikian bahwa *Good environmental governance* merupakan jenis aktivitas yang direalisasikan oleh suatu negara dengan partisipasi semua

anggota masyarakat dan memperhatikan kelestarian dan pelestarian lingkungan, terutama sumber daya alam. Tata Kelola pemerintahan memiliki tiga komponen: *Pertama*, administrasi publik berarti lembaga public; *Kedua*, tata kelola perusahaan yang dimiliki oleh sektor swasta; *Ketiga*, *civil society* atau masyarakat sipil. Hubungan ketiga komponen tersebut harus harmoni, sinergis dan terkendali.

Purniawati et al., (2020) mengutip Siahan prinsip *good environmental governance* adalah bahwa dalam penerapan tata kelola negara yang baik memerlukan tata kelola lingkungan yang berbasis pada kelestarian sumber daya, dan menurut Belbase dikutip World Bank, kegiatan yang ditujukan untuk keberhasilan penggunaan sumber daya alam dalam lingkungan yang berkelanjutan dengan menjaga kualitas hidup dan lingkungan disebut *good environmental governance*.

Addahlawi et al., (2019) menyebutkan ada 7 indikator prinsip *good environmental governance* yang dikutip dari Belbase :

1. Aturan hukum adalah cara mengatur warga negara. Karena hukum memiliki keleluasaan untuk mengatur hidup anda dengan mematuhi tata cara atau undang-undang yang berlaku. Hal ini untuk memungkinkan penegak hukum dan masyarakat untuk bertindak sesuai

- dengan aturan yang dibenarkan, bukan bertindak melanggar aturan.
2. Partisipasi dan representasi adalah keterlibatan seluruh komponen dalam manajemen untuk mencapai tujuan, baik non fisik dan fisik.
 3. Akses informasi adalah fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk memberikan atau memperoleh informasi.
 4. Transparansi dan Akuntabilitas. Prinsip transparansi menjamin keterbukaan akses informasi kepada setiap orang menerima informasi tentang kebijakan, prose, pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Prinsip akuntabilitas menjamin segala aktivitas dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka.
 5. Prinsip desentralisasi adalah suatu kewenangan khusus yang diberikan untuk mengatur daerahnya sendiri dengan kebebasan.
 6. Lembaga dan organisasi yaitu sebuah wadah yang memiliki peran dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan lingkungan. Entitas ini dapat berupa entitas pemerintah, publik, dan swasta.
 7. Akses terhadap keadilan berarti semua orang punya hak yang sama untuk memperoleh keadilan.

Pemerintahan akan dikatakan baik jika sumber daya dan urusan publik

dijalankan secara efisien dan efektif serta partisipatif. Pengelolaan sumber daya publik yang efektif, efisien, dan partisipatif memerlukan budaya demokrasi yang baik berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Menciptakan budaya demokrasi yang baik dibutuhkan pelaksanaan pemerintah yang jujur. (Nopyandri, 2014).

Purniawati et al., (2020) menjelaskan bahwa tata kelola lingkungan yang baik merupakan kegiatan penting untuk keberhasilan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan untuk melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan tersebut memerlukan transparansi yang sistematis dari lembaga lingkungan, kebijakan dan program yang mengikutsertakan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Juga tata kelola lingkungan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan melalui interaksi dengan masyarakat dalam konteks tata kelola lingkungan.

Pengelolaan lingkungan dalam konsep pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan yang perlu diterapkan dalam praktik pembangunan baik fisik maupun non fisik, hal ini penting sebab kita hidup pada modernisasi dan globalisasi yang menuntut pembangunan disegala sector, tapi disisi lain kita menyadari bahwa sumber daya alam yang kita miliki terbatas dan juga degradasi lingkungan semakin

hari semakin besar. Perubahan iklim dan pemanasan global menjadi puncak dari segala yang dampak lingkungan yang jika diabaikan justru akan mengancam kehidupan manusia, jika hal ini terjadi maka pembangunan yang dilakukan akan percuma. Maka pemerintah perlu bahkan sangat perlu untuk memperhatikan pengelolaan lingkungan dalam aspek pembangunan yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Pembangunan adalah sikap, perilaku, dan program yang dimiliki bersama oleh semua orang, dan pembangunan ada di mana-mana. Pembangunan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, pembangunan yang tidak terkendali membahayakan kehidupan manusia, menyebabkan hujan asam lebat, laut semakin tercemar, pencemaran udara, penipisan tanah dan banyak spesies tumbuhan dan hewan mati. Sehingga keseimbangan pembangunan tidak mengembirakan. Di satu sisi, kemajuan sedang dibuat, dan di sisi lain, ditemukan kerusakan lingkungan yang sangat menghambat kelangsungan kehidupan dan pembangunan itu sendiri.

Isu lingkungan dipandang sebagai isu industri yang punya duania berbeda.

Pembangunan seringkali kontradiktif untuk sebuah industri, orang-orang tampaknya dihadapkan pada pilihan antara 'lingkungan' dan 'pembangunan'. Padahal, lingkungan adalah masalah pembangunan. Karena sifat saling ketergantungan yang ada dalam lingkungan tidak memungkinkan untuk menjadikannya sebagai sektor tersendiri, sehingga perlu dicari ruang lingkup masalah yang menghubungkan lingkungan dan pembangunan. Ada pendekatan lintas sektor yang melemahkan perspektif lingkungan selama pembangunan.

Nopyandri, (2014) menjelaskan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka perlu untuk memenuhi beberapa syarat, yakni : Pertama, pemerintahan yang efektif. Jika pemerintahan lemah dan tidak berkapabilitas, kekuasaannya akan menjadi alat bagi sekelompok golongan tertentu untuk kepentingannya sendiri dan menyusahkan masyarakat sipil.

Kedua, pemerintah dalam aktivitasnya senantiasa berdasarkan aturan yang berlaku. Seluruh pejabat negara harus menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap hukum. Tidak ada kepastian hukum jika hukum tidak diikuti dan pemerintahan yang baik tidak dapat dijamin kecuali ada kepastian hukum.

Ketiga, Pemerintah harus memastikan supremasi hukum untuk melindungi cita-cita bangsa. Artinya

pemerintah harus bertindak secara adil dan tidak memihak dan harus memperlakukan setiap orang secara setara di depan hukum dan sesuai dengan hukum itu. Dengan demikian, penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindari dengan melanggar hukum secara ilegal untuk kepentingan kelompok tertentu.

Keempat, memastikan semua ini membutuhkan pengaturan demokrasi dan kelembagaan yang efektif.

Konsep yang lebih dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan atau (*sustainable development*) merupakan suatu proses pembangunan (tanah, kota, bisnis, masyarakat, dll) dengan komitmen "memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi dimasa akan depan" (Warlina, 2009) dikutip dari Brundtland Report dari PBB, 1987. Faktor paling serius yang dihadapi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana mengatasi kerusakan lingkungan tanpa membahayakan pertumbuhan ekonomi dan perlunya keadilan sosial. "lingkungan" adalah dimana kita semua tinggal, sedangkan "pembangunan" adalah apa yang kita semua lakukan untuk memperbaiki nasib manusia.

Formulasi pembangunan berkelanjutan berisi dua gagasan utama:

1. konsep "*need*", yaitu kebutuhan dasar untuk menjamin ketahanan manusia; dan
2. Gagasan keterbatasan, yaitu kesadaran masyarakat akan keterbatasan sumber daya pada kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan.

Implementasi kedua gagasan ini membutuhkan persyaratan pembangunan berkelanjutan, ialah :

1. Ketahanan lingkungan
2. Ketahanan Ekonomi
3. Ketahanan Sosial dan Budaya
4. Ketahanan Politik
5. Ketahanan Keamanan

Pembangunan berkelanjutan memerlukan kehati-hatian agar wilayah dapat dikembangkan tanpa mengganggu ekosistem ekologi yang ada. Penduduk lokal tidak terpinggirkan untuk keuntungan mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Bagi sekelompok orang, pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat tentang menemukan cara untuk mengembangkan ekonomi dalam jangka panjang tanpa menguras sumber daya alam. Namun, bagi kelompok lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah karena sumber daya alam sendiri terbatas.

Menurut kantor KLH tahun 1999 yang dikutip (Warlina, 2009),

Pembangunan berkelanjutan dapat diukur dengan tiga kriteria:

- a. Penggunaan sumber daya yang hemat;
- b. Mengurangi polusi dan lingkungan
- c. Aktivitas tersebut harus dapat meningkatkan sumber daya yang digunakan atau yang dapat diganti.

Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa prinsip penting (Warlina, 2009), yaitu:

1. Pembangunan harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi hak untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang.
2. Pembangunan harus tetap memperhatikan dan melestarikan ekosistem yang ada serta memastikan kualitas lingkungan tidak terdegradasi (berkelanjutan), tergantung daya dukungnya.
3. Setiap kegiatan pembangunan harus selalu memperhatikan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dan memperhatikan keberadaan kehidupan sekarang dan yang akan datang dimanapun mereka berada.
4. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek, baik fisik, mental, sosial dan budaya, tanpa menyalahgunakan atau merusak sumber daya alam yang ada dalam jangka panjang dan tanpa melebihi kemampuannya.

Pembangunan berkelanjutan adalah hubungan antara dimensi lingkungan, sosial dan ekonomi yang dikenal sebagai “tiga pilar” keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan memiliki keseimbangan antara sumber daya alam dan peningkatan taraf hidup masyarakat serta melestarikannya untuk masa depan. Pembangunan berkelanjutan secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi aspek kehidupan kita sehari-hari, masalah alam dan lingkungan. Proses pembangunan berkelanjutan berfokus pada ekonomi global, masalah alam dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap orang harus terlibat dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Tiga faktor pendorong dan saling berkaitan dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. Ekologi. Karena nilai ekologis keanekaragaman hayati sangat tinggi, kegiatan ekonomi tidak boleh hanya terfokus pada penggunaan sumber daya alam atau lingkungan yang dapat mengancam fungsi ekologis.
2. Moral. Sekarang setelah kita dapat menikmati sumber daya alam yang melimpah dan lingkungan yang terkomodifikasi, kita juga harus memikirkan ketersediaan sumber daya alam bagi orang-orang yang hidup di masa depan dari sudut pandang moral.

Kami tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat menyebabkan ekstraksi sumber daya alam secara berlebihan, yang pada akhirnya dapat merusak lingkungan dan membahayakan generasi mendatang.

3. Ekonomi. Karena ekonomi berkelanjutan biasanya merupakan paradoks, masih ada perdebatan apakah kegiatan ekonomi memenuhi kriteria untuk pembangunan berkelanjutan. Di satu sisi, ini bisa disebut pembangunan berkelanjutan, dan di sisi lain, dapat mengurangi karakteristik ekonomi, lingkungan, atau moral lainnya.

Pembangunan menjadi ujung tombak pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari sisi ekonomi, social dan budaya. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk memperhatikan aspek-aspek lain yang mendukung suksesnya realisasi pembangunan baik fisik maupun non fisik. Sebab jika pembangunan hanya dilakukan saja tanpa mempertimbangkan aspek lainnya dikhawatirkan justru akan berdampak buruk pada hidup masyarakat yang jauh dari tujuan sebenarnya.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan berasal dari istilah “*empowerment*” yang berasal dari Eropa abad pertengahan dan terus berkembang hingga akhir 70-an, 80-an dan awal 90-an kemudian saling berkaitan dengan teori

yang sedang berkembang. Konsep pemberdayaan merupakan usaha untuk memberikan otonomi, wewenang dan kepercayaan kepada setiap orang dalam suatu kelompok dan mendorong mereka untuk berkreasi dalam melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya.

Paul yang dikutip Hadi, (2015) menjelaskan pemberdayaan mengacu pada pembagian kekuasaan yang adil untuk tujuan meningkatkan kesadaran politik dan kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang lebih lemah, serta meningkatkan pengaruh atas “proses dan hasil pembangunan”. Menurut Friedman dalam hal ini, konsep pemberdayaan diartikan sebagai pengutamaan politik melalui pengambilan keputusan secara otonom untuk melindungi kepentingan rakyat berdasarkan sumber daya individu, partisipasi melalui pengamatan langsung, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui demokrasi.

Seringkali sukar membedakan pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan masyarakat (*community development*) sebab memiliki makna yang tidak jauh berbeda sehingga masyarakat sulit membedakan dalam penggunaannya sehari-hari. Kajian ini memandang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat sebagai program yang senagaja direncanakan oleh pemerintah untuk mendukung

perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya sehingga masyarakat pada akhirnya dapat mencapai pemberdayaan dan kemandirian ekonomi dan lingkungan berkelanjutan secara social. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat sebenarnya sangat kuat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, yang selalu memerlukan prasyarat bagi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dinamika ekonomi, lingkungan dan sosial.

Mengutip Chamber, (Noor, 2011) menjelaskan pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma pembangunan baru yang berpusat pada rakyat, partisipatif, inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Sebagai salah satu alternatif strategi pembangunan, pemberdayaan masyarakat telah dikembangkan dalam berbagai literatur dan pemikiran, namun belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat merupakan topik yang banyak diperbincangkan di masyarakat karena berkaitan dengan pembangunan dan

perubahan negara di masa yang akan datang, apalagi jika dikaitkan dengan masih minimnya keterampilan masyarakat akan menciptakan pertumbuhan ekonomi itu sendiri maka akan jauh lebih sulit.

Voges et al., (2016) menjelaskan lebih detail lagi, Pemberdayaan masyarakat berarti pengembangan, kemandirian, dan penguatan posisi kelas bawah dalam masyarakat terhadap kekuatan yang beroperasi di semua tingkatan dan strata. Ini juga berarti berdiri di sisi yang lemah dan mengadvokasi mereka untuk mencegah persaingan dan eksploitasi yang tidak setara.

Pembangunan adalah usaha untuk merangsang perubahan sosial yang sistematis, terencana dan terkendali. Perencanaan dan pemantauan secara berkala merupakan pendekatan yang menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan guna meningkatkan taraf hidup. Perubahan sosial ini melibatkan aspek lahir dan batin kehidupan. Nilai-nilai sosial dan budaya internal benar-benar didukung dan dihormati, sedangkan nilai-nilai baru eksternal harus disaring dan diasimilasi untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman. Bermanfaat atau bermanfaat bagi kehidupan yang melindungi masyarakat dan martabat manusia.

Oleh karena itu, pemberdayaan dapat kita pahami baik sebagai proses dan

tujuan. Pemberdayaan sebagai suatu proses ialah rangkaian aktivitas yang memperkokoh daya atau pemberdayaan masyarakat yang masih lemah, sebagai tujuan pemberdayaan mengacu pada kondisi atau hasil yang ingin diwujudkan oleh masyarakat. perubahan, artinya masyarakat memiliki tanggung jawab, memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, percaya diri, mampu menyalurkan aspirasinya, memiliki pekerjaan, berpartisipasi aktif dalam aktivitas pembangunan fisik dan non fisik serta mandiri dalam mewujudkan kehidupan. proses sekaligus tujuan.

Suharto yang dikutip (Voges et al., 2016) mengusulkan tiga ukuran pemberdayaan mengacu pada :

- a. Sebuah proses evolusioner yang dimulai dengan kemajuan individu dan seterusnya mengalami peningkatan menjadi perubahan sosial yang lebih luas.
- b. Keadaan psikologis yaitu keadaan seseorang mampu memotivasi dirinya sendiri sehingga mengalami kemajuan individu.
- c. Perubahan structural yang menindas akibat pembebasan yang dilakukan dengan kolektifitas kaum lemah.

Voges et al., (2016) menyimpulkan beberapa prinsip dan asumsi pemberdayaan adalah, sebagai berikut :

- a. *Empowerment* merupakan proses kolaboratif di mana masyarakat dan pemerintah bekerja sama sebagai mitra.
- b. Proses *empowerment* memandang sistem pemerintah sebagai pemeran yang cakap yang dapat menyediakan akses ke sumber daya dan fitur.
- c. Pemerintah harus berdiri di pihak mereka sebagai agen yang menjadi dan memiliki kapabilitas untuk melakukan perubahan.
- d. Kompetensi didapat lewat pengalaman hidup.
- e. Pemecahan masalah didasarkan pada situasi masalah yang muncul dari kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut.
- f. Media informasi merupakan sarana pendukung yang penting untuk mengatasi tekanan, membangun kompetensi, dan mengembangkan pengendalian diri.
- g. Masyarakat harus memberdayakan diri dan berpartisipasi dalam mencapai tujuan, substansi dan hasil pemberdayaan yang perlu diwujudkan.
- h. Kesadaran dan pengetahuan tentang perubahan perilaku merupakan tantangan utama bagi pemberdayaan.
- i. Pemberdayaan adalah tentang mendapatkan sumber daya dan kemampuan untuk menggunakannya secara efektif.

j. Metode pemberdayaan merupakan metode yang selalu berubah dan hubungan selalu berubah dan berkembang, sebab setiap masalah selalu memiliki solusinya sendiri.

k. Pemberdayaan dapat terwujud dengan rekonsiliasi struktur kepribadian dan perkembangan sosial ekonomi.

Menurut Noor, (2011) Upaya pemberdayaan masyarakat (empowerment) dalam kerangka ini dapat ditelaah dalam tiga perspektif.

Pertama, *Enabling* adalah menciptakan suasana di mana potensi masyarakat dapat dikembangkan. Keluarga adalah tentang pemahaman bahwa masing-masing orang, masyarakat sipil, mempunyai potensi untuk berkembang. Pemberdayaan adalah upaya membangun kekuatan dengan cara membangkitkan kesadaran, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi suatu masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.

Kedua, *Empowering* adalah, memberdayakan masyarakat melalui langkah-langkah konkrit yang mencakup pemberian masukan yang berbeda dan kesempatan yang berbeda untuk memberdayakan mereka. Upaya yang paling mendasar untuk pemberdayaan ini adalah peningkatan pendidikan dan kesehatan serta akses terhadap sumber-sumber pembangunan ekonomi (modal,

teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar) (irigasi, jalan, listrik, sekolah, utilitas, kesehatan) dapat dicapai di lapisan masyarakat paling bawah dengan daya yang sangat terbatas.

Ketiga, *Protecting* Dengan kata lain, membela dan melindungi kepentingan orang-orang yang kurang mampu. Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan pembentukan, peradaban, dan pengalaman demokrasi, karena penguatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pengambilan keputusan di mana anda dan komunitas anda terlibat.

Masyarakat adalah objek sekaligus subjek dalam peradaban sehingga keberlangsungan dan keberlanjutan hidupnya menjadi prioritas. Selain itu keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan juga menjadi penting sebab factor ini akan membantu keberlanjutan dan keberlangsungan ekosistem yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Maka alat yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan hal tersebut adalah dengan pembangunan baik non fisik ataupun fisik tentu dengan memperhatikan aspek-aspek lainnya, pembangunan akan mendorong kemajuan peradaban dan juga akan membantu pengelolaan lingkungan dengan baik.

KESIMPULAN

Konsep *good environmental* dan pembangunan berkelanjutan merupakan

sebuah konsep yang berupaya untuk memfasilitasi lingkungan sehat dan keseimbangan ekosistem sehingga dapat berguna bagi kemajuan dan pemberdayaan masyarakat. Dewasa ini salah satu ancaman terbesar umat manusia adalah kerusakan lingkungan, maka penerapan *Good environmental governance* menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak kerusakan untuk menjaga dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* juga telah menjadi sebuah konsep pembangunan yang menginisiasi keseimbangan perlu diterapkan dalam pembangunan hari ini. Pemberdayaan masyarakat tidak bisa terjadi begitu saja tanpa ada upaya-upaya mewujudkannya, upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan keseimbangan lingkungan merupakan hal penting dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini meskipun telah menyajikan berbagai teori sebagai kajian dari ketiga variable tersebut namun disatu sisi penelitian juga memiliki keterbatasan. Peneliti menganggap studi literatur ini tidaklah mampu menjawab secara mendalam pertanyaan-pertanyaan terkait ketiga variable tersebut, apalagi jika ketiga atau salah satu variable penelitian ini dikaitkan dengan sebuah fenomena dan kasus-kasus yang berbeda disetiap daerah

sehingga diperlukan metode penelitian yang lebih akurat dan kredibel sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, K. L., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2019). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *JGG- Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 8(2).
- Baskoro, M. S. P. (2016). Pengelolaan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat Desa Sukarara. *JGG- Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 5(2).
- Hadi, A. P. (2015). Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*, 1–14.
- Khasanah, U., Nugraha, N., & Kokotiasa, W. (2017). Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosonoterhadap Hak Ekonomi Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 108.
- Miswanto, & Safaat, M. (2018). Dampak Pembangunan Industri Pariwisata Terhadap Alih Fungsi Lahan (Studi Tentang Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau). *Jurnal Nasional Pariwisata*, 10(1), 14.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87–99.
- Nopyandri. (2014). Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 43278.
- Purniawati, Kasana, N., & Rodiyah. (2020).

- Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 43–56.
- Sururi, A. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 3(2).
- Timotius, K. H. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Voges, M., Kerebungu, F., & Mandey, L. C. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Di Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang. *Jurnal Politico*, 5(1).
- Warlina, L. (2009). Prinsip-prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan. *Modul Manajemen Pembangunan Dan Lingkungan*, 1–38.